

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia telah membuat kemajuan yang terhormat dalam bidang pembangunan manusia selama 25 tahun terakhir (Vandemoortele, 2018). Hal ini tidak lepas dari kesadaran dunia internasional terhadap manfaat pembangunan berkelanjutan. Agenda 2030 mengubah konteks kebijakan global untuk olahraga dan pengembangan ketika menggantikan delapan Tujuan Pembangunan Milenium / *millennium development goals* (MDGs) dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang lebih luas (Lindsey, Chapman, & Dudfield, 2020). SDGs menjabarkan agenda komprehensif untuk pembangunan global untuk periode 2015-2030 (Vandemoortele, 2018). Olahraga dipandang sebagai alat untuk mencapai 8 Tujuan MDGs dan baru-baru ini 17 SDGs (Mwaanga & Adeosun, 2019). Sementara olahraga tidak secara eksplisit disebutkan dalam SDGs itu sendiri, teks Agenda 2030 yang menyertainya secara spesifik mengakui olahraga ‘sebagai pendukung penting pembangunan berkelanjutan (Vandemoortele, 2018).

Bidang Olahraga untuk Pembangunan dan Perdamaian / *Sport for Development and Peace* (SDP) telah berkembang sejak deklarasi Magglingen pada tahun 2003, yang secara resmi mengakui olahraga sebagai sarana yang berguna untuk mempromosikan perubahan sosial (Svensson & Cohen, 2020). Fokus pada partisipasi untuk populasi secara keseluruhan tidak hanya dapat meningkatkan daya saing olahraga internasional tetapi juga memperkaya kesejahteraan, menurunkan biaya perawatan kesehatan dan menyediakan pekerja yang lebih efisien dan produktif yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan (Ridpath, Rudd, & Stokowski, 2020).

Selama dekade terakhir telah ada minat yang meningkat dalam tata kelola dan penerapannya pada olahraga, baik dalam konteks akademik dan profesional (Pielke et al., 2019). Salah satu tujuan kebijakan utama dari banyak Departemen Pemerintahan Olahraga dan Kesehatan di Eropa adalah untuk meningkatkan partisipasi olahraga dalam rangka mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan warga negara (Silva, Monteiro, & Sobreiro, 2019).

Konseptualisasi pemerintahan dan sifat penerapannya pada olahraga telah bervariasi secara signifikan meskipun studi cenderung memusatkan pada definisi yang berkaitan dengan Tujuan, manajemen, dan kekuasaan (Pielke et al., 2019). Integritas olahraga masih merupakan konsep yang muncul dalam dunia etika olahraga, ekonomi, tata kelola dan manajemen (Harvey & McNamee, 2019). Selain itu, penting untuk memahami tuas, hambatan, atau kesulitan yang terkait dengan proses pelibatan pemegang kebijakan dengan berbagai status dan bidang tindakan (Viollet, Scelles, & Ferrand, 2020). Dalam mengurai kelemahan kebijakan olahraga di Indonesia anda dapat melihat gambar di bawah ini :

Tabel 1.1 :
Kelemahan Kebijakan Pengembangan Olahraga di Indonesia (Ma'mun, 2019a)

Sports Scope				
Era	Educational	Recreational	Elite	Description
Old Order (1945–1966) ± 21 years	Not considered a strategic issue because it was not populist in the political realm.	Only invited to perceive elite sports activities as a movement	The coaching and development system had not been developed, with the exception of preparations for the 1962 Asian Games	Focus on sports coaching in the political area
New Order (1966–1998) ± 32 years	Not considered a strategic issue despite following the public tendency	Becomes an important issue with the goal of fitness only	There is no standard concept except for multi-event preparation.	There Description Focus on sports coaching in the political area There is a focus on sports coaching in the community, but it is still unstructured.
Reform Era (1998–present)	Considered an important issue, although new as policy materia	Not an important issue, although the draft concept began to be formulated	The development of elite sports occurs without a clear policy direction	Focus on sports coaching in the area of education
>19 years	The reverse – not considered an important issue, although character education is inflated	Policy direction and policy implementation strategy are far from the proper structure	The development of elite sports is far from what was expected, even though legal references are already clear	All three become the focus, although the direction of policy still out of the proper legal references

Dengan demikian, pada prinsipnya arah kebijakan olahraga mengikuti proses arah kekuasaan. Kepemimpinan nasional memiliki otoritas signifikan atas peluncuran kebijakan dan karenanya harus memutuskan kebijakan mana yang paling penting (Ma'mun, 2019a). Pertimbangan prioritas kebijakan nasional memiliki harapan untuk mencapai dan diadopsi di tingkat masyarakat (Millar, Clutterbuck, & Doherty, 2020). Namun, banyak kekhawatiran tetap sehubungan dengan kebijakan yang mengatur olahraga (Benjamin H. Nam, Marshall, Love, Graham, & Lim, 2020). Pembuat keputusan cenderung membuat keputusan berdasarkan aliansi informal mereka untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka (Keane et al., 2019).

Dokumen kebijakan olahraga elit saat ini cenderung terfokus pada dampak yang relatif sempit (paling sering ada referensi untuk stimulasi partisipasi olahraga masyarakat dan kebanggaan nasional atau dampak ekonomi) (De Rycke & De Bosscher, 2019). Berikut rancangan teknokratik indikator target pembangunan manusia di Indonesia :

Tabel 1.2 Indikator/Target Pembangunan Manusia (Bappenas, 2019, p. 100).

No	Indikator	Baseline	Target 2024
	Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga		
	a. Presentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	31,39% (2018)	40%
23	b. Peringkat Asian Games	Peringkat ke-4 (2018)	Peringat ke 6 sampai ke-8 (2022)
	c. Peringkat Asian Para Games	PERingkat ke-5 (2018)	Peringkat ke-4 sampai ke-6 (2022)
	d. Jumlah prolehan medali pada Olympic Games	1 Medali emas (2016)	3 medali emas
	e. Jumlah perolehan medali pada Paralympic Games	-	1 medali emas
Keterangan: * angka kumulatif			

Perspektif meninjau tingkat kesuksesan olahraga berdasarkan jumlah medali yang diperoleh merupakan perspektif yang tidak tepat dalam konteks pembangunan melalui olahraga. Dengan cara yang sama, karena masyarakat telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, olahraga telah berkembang untuk mendapatkan kepentingan yang luar biasa, baik secara sosial maupun ekonomi (Durán-S,ánchez, Álvarez-García, & del Río-Rama, 2019). Salah satu poin kunci yang muncul dari bukti yang tersedia adalah bahwa penyampaian dampak sosial tidak muncul secara spontan dalam banyak kasus, tetapi hal itu mencakup menempatkan mekanisme dan program tata kelola yang kompleks untuk mengarahkan tindakan kolektif (De Rycke & De Bosscher, 2019). Sehingga diperlukan kajian lebih mendalam terhadap dokumen kebijakan pembangunan.

Perkembangan terjadi sepanjang umur dan mengharuskan individu dari semua lapisan masyarakat untuk beradaptasi dan mengubah keadaan yang mereka hadapi, bahkan ketika keadaan itu berubah sepanjang umur (Walsh, Green, Harrison, & Bowers, 2019). Berikut kajian potensi dampak yang dihasilkan dalam membangun sistem pembinaan jangka panjang.

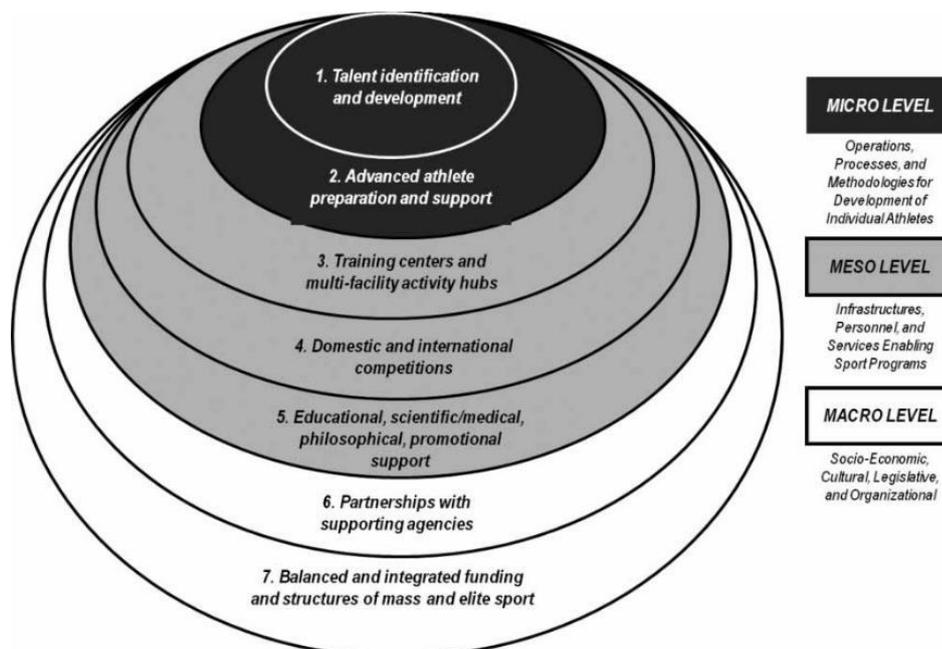
Tabel 1.3
Mapping elite sports' potential societal impact (MESSI) framework (De Rycke & De Bosscher, 2019)

Context	Events Worldcups - Olympic Games - Championships			Athletes & Teams Athletes - footballplayers - sportsteams		Successes winning medals - games - records		Stakeholders coaches - sportorganisations - sponsors		
Category	1. Social equality & inclusion	2. Collective identity & pride	3. Ethics & fair play	4. Feel good & passion	5. Fans & (media) attraction	6. Prestige & image	7. Athletes ability & lquality of life	8. Sport participation & health	9. Sponsors commercial activity	10. Local consumption & living conditions
Potential Positive Impact	Intergration	Community identity	Ethics	Pleasure	Beauty of Sport Fandom	Globalization International Prestige	Fame	Identification	Economic boost	Consumption
	Social Equality	Community Pride	Symbolizm/ Rituals	Special experiences Celebrities	Celebrities		Role model function	Sport Participation		Employment
	Inclusion		Fair Play	well-being passion	Media Consumption	Political Power	Quality of life	Voluntering	Sponsorship Media right Sport industry access	Tourism (Sport infrastructure)
	Social Justice	Socializing Opportunities	Social debate							
	Socio-economic				Sport Knowledge	Peace Building Country/ City Marketing	Life skills	Adoption Qualities Health awareness	Commercial activity	Greening
	Quality								Innovation Fundraising	
Potential Negative impacts	Sexism Exclusion	Opposition & rivalry	Corruption & fraud	Disappointment Failure	Gambling (addiction)	Soft power	Pressure Injuries	Discouragement effect	Association with scandals Financial Hangover	Legacy costs
	Exploitation	Chauvinism	Hooliganism		Repulsion	Bad international image	Safeguarding issues	Unhealthy lifestyle		Environmental impact
	Discrimination	Shame	Deviant examples		Drop sports image	War Propaganda	Post-career depression Doping	Disorted body image		Declined living conditions Excessive investment

Melalui pengembangan sistem pembinaan jangka panjang dapat mereduksi dampak negatif karena selalu memiliki ruang bagi kelompok non-elit dan kurang beruntung pada masyarakat. Dalam upaya membangun sistem pembinaan jangka panjang, terdapat potensi dampak positif dan potensi dampak negatif yang perlu dikaji, sehingga dalam proses pengembangan kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan negara maju. Pemahaman tentang faktor-faktor yang menentukan kesejahteraan subyektif tampaknya penting, sehingga kebijakan publik yang memadai berfokus pada faktor-faktor yang secara efektif meningkatkan perasaan kesejahteraan individu dapat dipahami dan diimplementasikan (Silva et al., 2019). Sebagai contoh, dampak negatif sering diperuntukkan bagi kelompok non-elit dan kurang beruntung dalam masyarakat kita (De Rycke & De Bosscher, 2019). Salah satu permasalahan sistem pembinaan olahraga di Indonesia adalah, kebijakan mengambil jalan pintas yang disediakan oleh panitia penyelenggara, kondisi ini tidak dapat terus terjadi karena akan mengganggu sistem pengembangan olahraga di tingkat regional, dan pada gilirannya Olahraga elit di tingkat internasional seperti Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games akan terus merosot (Ma'mun, Abdullah, Slamaet, Kharunnisa, & Budiartii, 2019)

Dengan meningkatnya minat negara-negara dalam memperoleh keunggulan kompetitif dalam olahraga elit, semakin banyak penelitian yang berusaha mengidentifikasi fitur-fitur umum dari sistem olahraga elit nasional yang berhasil (Valenti, Scelles, & Morrow, 2019). Meskipun dimungkinkan untuk menyelesaikan penerapan tata kelola jaringan multi-level pada sistem tata kelola Olimpiade, penting untuk mengakui bahwa literatur tata kelola jaringan tidak memberikan pandangan yang disepakati secara universal tentang tata kelola jaringan (Pielke et al., 2019). Artinya para pakar olahraga sendiri harus menyamakan visi dalam merumuskan kebijakan di dalam olahraga. Secara sederhana, para pelaku olahraga harus terus berkomunikasi aktif dengan para pemegang kebijakan, sehingga arah kebijakan olahraga dapat terarah dan terus terukur.

Seiring berkembangnya era teknologi dan globalisasi, muncul gagasan untuk memetakan kondisi tingkat keberhasilan kebijakan olahraga yang telah terbangun. Salah satu model yang digunakan adalah Model Tipe-ideal Pengembangan *High Performance* (HP) dan Pengembangan Masal olahraga. Dimana Elemen dan praktik sistemik HP yang relevan dalam model digabung menjadi tujuh elemen yang bersama-sama memberikan perkembangan metodis dari massa ke olahraga elit (Carney, Smolianov, & Zakus, 2012). Ketujuh elemen model pembinaan ini dapat dilihat melalui gambar dibawah ini :



Gambar 1.1. Model Tipe-ideal Pengembangan *High Performance* (HP) dan Pengembangan Masal olahraga (Carney et al., 2012)

Elemen ke 1 dan ke 2 berada didalam level mikro. Elemen ke 2, 3, 4 dan 5, berad didalam level meso dan elemen ke 6 dan 7 berada dalam level makro. Model yang diusulkan mendefinisikan tingkat makro sebagai dukungan sosial-ekonomi, budaya, legislatif, dan organisasi untuk sistem olahraga nasional oleh seluruh masyarakat dan negara; tingkat meso meliputi infrastruktur, personel, Ketersediaan pelayanan program olahraga; dan tingkat mikro terdiri dari operasi, proses, dan metodologi untuk pengembangan atlet individu (Smolianov et al., 2020)

Permasalahan utama poin sistem pembinaan dan pengembangan olahraga di Indonesia adalah, belum tertata dan terstandardisasinya sistem pembinaan olahraga elit; belum terintegrasinya kebijakan pembinaan olahraga antara pusat dan daerah; belum terintegrasinya kegiatan olahraga dengan sistem pendidikan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan; belum tertatanya sistem pembibitan; terbatasnya sarana dan prasarana olahraga, terutama untuk sentra pembinaan; terbatasnya tenaga keolahragaan berkualifikasi memadai; belum terstrukturnya sistem penghargaan; belum berkembangnya sentra pembinaan olahraga di daerah-daerah; belum tertatanya kompetisi dan industri olahraga; serta belum optimalnya penerapan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) kedalam sistem pembinaan (Ma'mun, 2016).

Sebagai cabang olahraga yang baru berkembang, bolatangan memiliki tantangan pengembangan. Semakin banyak kemungkinan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, semakin banyak orang akan terlibat (Ridpath et al., 2020). Sehingga pada prinsipnya kompetisi merupakan faktor kunci dalam membangun suatu sistem pembinaan cabang olahraga. Korea Selatan telah menyelenggarakan banyak acara olahraga besar dan mencapai kesuksesan olahraga internasional dalam beberapa dekade terakhir (Benjamin H. Nam et al., 2020). Dalam bolatangan, Indonesia sendiri beberapa kali berpartisipasi dalam event internasional dan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kelas Asia.

Tabel 1.4 Daftar partisipasi kompetisi Timnas Indonesia

No.	Nama Kompetisi	Kelas	Tahun
1	Asian Games (Host)	Senior	2018
2	Asian Womens Handball Championship (Host)	Senior	2012, 2015
3	Asian Womens Youth Handball Championship (Host)	Youth	2017
4	IHF Trophy Zone 1B (Host 2016)	Youth - Junior	2012, 2014, 2016, 2018, 2019
5	Qatar Womens Handball Championship	Senior	2012
6	South East Asian Handball Championship (SEAHAFF)	Senior	2012-2013-2015

Yang perlu dipahami adalah keikutsertaan Indonesia dalam kompetisi internasional belum sebanding dengan kualitas pemasalan cabang olahraga itu sendiri, sehingga sistem yang terbangun belum terukur dan terarah secara maksimal. Dampak politis yang pernah cabang olahraga bolatangan dapatkan adalah pada masa Asian Games 2018. Sebagai cabang olahraga yang baru berkembang dan memiliki potensi rendah peraih medali di Asian Games, cabang olahraga bolatangan merupakan salah satu cabang olahraga yang dicoret dalam hasil rapat INASGOC dengan Wakil Presiden tanggal 11 April 2018, padahal cabang olahraga bolatangan sendiri merupakan cabang olahraga olimpiade. Pada proses selanjutnya, cabang olahraga bolatangan tetap dipertandingkan, hal ini tidak lepas dari peran Presiden Bolatangan Asia (*Asian Handball Federation/AHF*) Sheikh Ahmed Al-Fahad Al-Ahmed Al-Sabah yang juga merupakan Presiden Komite Olimpiade Asia (*Olympic Council of Asia / OCA*). Permasalahan ini merupakan permasalahan kompleks yang tidak dapat dikaji sendiri sebab bolatangan merupakan bagian dari bangunan keolahragaan Indonesia yang disebut sistem keolahragaan nasional dan sistem keolahragaan nasional sendiri merupakan bagian dari bangunan besar yang disebut kebijakan pembangunan nasional.

Beberapa konstruksi teoretis digunakan dalam membandingkan dan membedakan olahraga HP di berbagai negara (Ridpath et al., 2020). Konsep tata kelola / *governance* sendiri berkembang setiap waktu (Dowling, Leopkey, & Smith, 2018). Perspektif tantangan yang dihadapi adalah entitas nasional dan organisasi melihat bagaimana *governance* diterapkan di tingkat organisasi nasional atau lokal, dan dalam menerapkan prinsip-prinsip *governance*, dimana melalui perspektif analisis elemen mikro yang merupakan kunci dalam mengembangkan tata kelola akuntabel (Winand & Anagnostopoulos, 2019, p. 2). Agar tercipta pemahaman kompershensif, penelitian *SfD* secara konsisten berfokus pada studi kebijakan tingkat makro, pengembangan masyarakat tingkat meso, dan pengembangan individu tingkat mikro (Walsh et al., 2019). Adapun permasalahan yang penulis temukan adalah, belum adanya konsep kebijakan strategis dalam rangka mendorong konsep pembangunan melalui olahraga dalam rangka mendorong perkembangan tata kelola olahraga di Indonesia, khususnya cabang olahraga bolatangan.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, berikut pertanyaan penelitian ini :

- 1.2.1. Bagaimana kondisi tata kelola cabang olahraga bolatangan pada tataran level Mikro ?
- 1.2.2. Bagaimana kondisi tata kelola cabang olahraga bolatangan pada tataran level Meso ?
- 1.2.3. Bagaimana kondisi tata kelola cabang olahraga bolatangan pada tataran level Makro ?
- 1.2.4. Bagaimana kondisi tata kelola cabang olahraga bolatangan di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, berikut tujuan penelitian ini :

- 1.3.1. Untuk mengetahui kondisi tata kelola cabang olahraga bolatangan pada tataran level Mikro.
- 1.3.2. Untuk mengetahui kondisi tata kelola cabang olahraga bolatangan pada tataran level Meso.
- 1.3.3. Untuk mengetahui kondisi tata kelola cabang olahraga bolatangan pada tataran level Makro.
- 1.3.4. Untuk mengetahui kondisi tata kelola cabang olahraga bolatangan di Indonesia.

1.4. Batasan Penelitian

Untuk memperoleh fokus dalam penelitian, berikut batasan konseptual dan subjek penelitian ini :

1.4.1. Batasan Konseptual

Konsep tata kelola suatu cabang olahraga merupakan bagian dari sistem keolahragaan nasional, sistem keolahragaan nasional merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional. Tata kelola disusun berdasarkan perspektif pembangunan melalui olahraga menggunakan *Ideal-Type Model of Integrated High Performance and Mass Sport Development*,

1.4.2. Subjek Penelitian

- a. Pelatih Tim Nasional Bolatangan Indonesia dalam rentang 2012-2019
- b. 2 Pakar Kebijakan Olahraga Indonesia
- c. Dokumen Kebijakan Nasional

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk :

Secara teoritis

1. Menambah jumlah referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan olahraga bolatangan.
2. Memberikan sumbangan yang berharga bagi para pelaku di dalam bolatangan, baik pelatih, atlet maupun pemegang kebijakan

Secara praktis

1. pengembangan tata kelola cabang olahraga
2. Memetakan kondisi perkembangan cabang olahraga bolatangan, sehingga progres perkembangannya dapat terukur.
3. Rujukan penyusunan sistem pembinaan jangka panjang.